

INTISARI

Keberhasilan pengelolaan anggaran pemerintah daerah dapat dinilai dari kinerja penyerapan anggarannya. Penyerapan anggaran yang tepat waktu dapat mewujudkan belanja yang berkualitas sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang masih terjadi terkait penyerapan anggaran yaitu penyerapan anggaran belanja yang rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun anggaran. Penyerapan anggaran tersebut mengakibatkan harapan adanya stimulus dari belanja pemerintah sebagai penggerak perekonomian menjadi tertunda. Keberhasilan pelaksanaan anggaran juga memerlukan adanya sebuah pengawasan keuangan. APIP diharapkan mampu mengawal penyerapan anggaran untuk mencegah penyerapan anggaran yang tiba-tiba meningkat pesat pada akhir tahun.

Penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis tingkat kecenderungan penumpukan penyerapan anggaran belanja, menganalisis faktor-faktor penyebabnya, serta menganalisis segala tindakan dan upaya pengawasan penyerapan anggaran belanja yang telah dilakukan Pemkab Bantul. Data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa data Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), laporan realisasi anggaran per triwulan, dan data anggaran kas per triwulan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan dari SKPD yang terpilih menjadi partisipan. Wawancara dilakukan kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan, kasubbag keuangan, dan pelaksana teknis kegiatan pada DPPKAD, RSUD Panembahan Senopati, Disperintah, Disperindagkop, Dikdas, dan Dikmenof. Dalam hal pengawasan, wawancara dilakukan kepada pejabat dan aparatur pengawas di Inspektorat. Hasil wawancara dianalisis berdasarkan tema yang ditentukan setelah dilakukan *coding* data.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa kecenderungan penumpukan penyerapan anggaran belanja pada akhir tahun masih terjadi di Pemkab Bantul. Tingkat penumpukan penyerapan anggaran belanja terbesar terjadi pada triwulan keempat. Tingkat penyerapan anggaran per jenis belanja cenderung rendah di awal tahun dan tidak sesuai dengan rencana penarikan kasnya sehingga menumpuk penyerapannya di triwulan keempat. Faktor-faktor penyebabnya yaitu faktor perencanaan anggaran, faktor pelaksanaan dan penatausahaan, faktor pengadaan barang/jasa, faktor peraturan, dan faktor sumber daya manusia. Faktor yang paling memengaruhi yaitu penyusunan rencana kegiatan anggaran yang kurang baik. Upaya pengawasan penyerapan anggaran yang telah dilakukan Pemkab Bantul meliputi pemeriksaan reguler; evaluasi SPIP, revidir laporan keuangan, dan revidir laporan kinerja; dan upaya lainnya. Kegiatan pengawasan yang belum dilakukan oleh Inspektorat yaitu kegiatan revidir RKA.

Kata kunci: penumpukan, penyerapan anggaran belanja, pengawasan, pemerintah daerah.

ABSTRACT

Successful management of local government budgets can be judged on the performance of budget absorption. Absorption of timely budget can realize a quality expenditure so as to encourage economic growth in order to improve public welfare. The problems are still occurring in relation to the budget absorption is a low budget absorption in the early years and accumulate at the end of the fiscal year. The budget absorption lead to the expectation of stimulus from government spending as a driver of the economy to be delayed. The successful implementation of the budget also requires the existence of a financial supervision. APIP is expected to escort budget absorption to prevent budget absorption suddenly increased rapidly at the end of the year.

This study is a qualitative study aimed to analyze the tendency of buildup budget absorption, analyze its causes, and to analyze their actions and efforts to supervision budget absorption in Bantul district government. The data used is secondary data and primary data. Secondary data were used that budget implementation document (DPA), budget realization reports per quarter, and a cash budget per quarter. The primary data obtained from interviews conducted to the informant from SKPD selected as participants. Interviews were conducted to officials of the technical implementation of activities, head of finance, and technical implementation of activities on DPPKAD, RSUD Panembahan Senopati, Disperhut, Disperindagkop, Dikdas, and Dikmenof. In terms of supervision, interviews were conducted to officials and personnel supervisor at the Inspektorat. The results were analyzed based on the theme of the interview was set after the data coding.

The result of data analysis showed that the tendency of buildup budget absorption at the end of the year occurred in Bantul district government. The level of budget absorption biggest buildup occurred in the fourth quarter. Budget absorption rate per type of expenditure tends to be low at the beginning of the year and not in accordance with the plan to withdraw the cash so that accumulate absorption in the fourth quarter. The factors that cause the buildup of budget absorption are factors of budget planning, factors of implementation and administration, factors of procurement, factors of regulatory, and factors of human resources. The most influential factors are planning budget activities that are less good. Efforts to supervision the budget absorption has been done for Bantul include regular inspection; SPIP evaluation, review of financial statements, and review performance reports; and other efforts. Supervisory activities have not been carried out by Inspektorat which RKA review activities.

Keywords: buildup, budget absorption, supervision, local government.